

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan kesehatan dalam penanganan masalah kekurangan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui peraturan gubernur no 6 tahun 2012 tentang rencana aksi daerah percepatan pemenuhan pangan dan gizi serta faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat di dalam proses implementasi. Fokus penelitian ini pada konten dan konteks kebijakan yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Permasalahan muncul ketika pemerintah provinsi mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah pangan dan gizi di Nusa Tenggara Timur, namun setelah diimplementasikannya kebijakan ini, tidak dapat mengatasi masalah kekurangan gizi di Nusa Tenggara Timur namun data menunjukkan adanya peningkatan angka kekurangan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam implementasi kebijakan kesehatan dalam penanganan masalah kekurangan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh konten dan konteks kebijakan. Konten kebijakan dipengaruhi oleh jangkauan perubahan yang diinginkan dalam isi kebijakan yang bertolak belakang dengan budaya masyarakat serta tersebarinya kedudukan pengambil keputusan dan faktor konteks kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik aktor kebijakan dengan melakukan politisasi program untuk mempertahankan kekuasaannya. Adapun faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan kesehatan yakni sebagai berikut faktor pendorong: kepentingan kelompok sasaran di dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, sumber daya yang disediakan dan pelaksana program adapun faktor penghambat implementasi kebijakan yakni sebagai berikut: jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, kepentingan politik aktor kebijakan, karakteristik lembaga penguasa, konsistensi dan daya tanggap kebijakan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Konten dan Konteks kebijakan, Aktor kebijakan, Politisasi program

ABSTRACT

This study aims to see how the implementation of health policy in handling malnutrition problem in East Nusa Tenggara Province through governor regulation no 6 of 2012 about action plan of area acceleration of fulfillment of food and nutrition as well as what factors push and hamper in implementation process. the focus of this research on the content and policy context that influences policy implementation. The problem arose when the provincial government issued a policy to address food and nutritional problems in East Nusa Tenggara, but after the implementation of this policy, it was unable to overcome malnutrition in East Nusa Tenggara but the data showed an increase in malnutrition in East Nusa Tenggara Province. The theory used in this research is the theory of policy implementation. This research uses qualitative research method The results of research indicate that in the implementation of health policy in handling malnutrition problem in East Nusa Tenggara Province influenced by content and policy context. Policy content is influenced by the range of desired changes in policy content contrary to the culture of society and the spread of decision-making positions and policy context factors influenced by the political interests of policy actors to maintain their power. The factors driving and impeding the implementation of health policy are as follows: the importance of the target group in the content of the policy, the types of benefits generated, the resources provided and the implementer of the program as for the impeding factors of policy implementation are as follows: the range of desired changes, decision makers, political interests of policy actors, the characteristics of ruling institutions, consistency and policy responsiveness.

Keywords: Policy implementation, content and policy context, policy actor, program politicization